


PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh BUSTANUN NASIHIN ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S-1) Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Drs. Miftahul Arifin
NIP. 194607191966071001

Sekretaris,



Moh. Hatta, M.HI
NIP. 197110262007011012


Penguji I,

Penguji II,

Pembimbing,



Drs. H. Abdullah, M.Ag
NIP.196309041002031002



Siti Musfiqoh, M.El
NIP. 197608132006042002



Drs. Miftahul Arifin
NIP. 194607191966071001

Surabaya, 12 Juli 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195805201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*Field reseach*) dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Upah Juru Pungut Donatur Dana Sosial Di Yayasan Al-Jihad Surabaya”. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang; 1) Bagaimana ketentuan dan pelaksanaan pemberian upah anggota jungut donatur dana sosial di Yayasan Al-Jihad Surabaya?, 2) Bagaimana analisis hukum islam terhadap ketentuan dan pelaksanaan pemberian upah anggota jungut donatur dana sosial di Yayasan tersebut?.

Guna menjawab permasalahan di atas, maka data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya penelitian ini bersifat kualitatif yang menghasilkan data yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan metode induktif.

Pembahasan dalam skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa anggota jungut dikatakan juga sebagai petugas amil zakat, karena anggota jungut bekerja mengambil zakat, hibah, infaq dan shadaqah dari para donatur. Akad kerja yang dipakai antara Yayasan dengan anggota jungut adalah akad kerjasama atau dalam fiqih disebut akad ijarah. Dalam ketentuan pengupahan anggota jungut di Yayasan Al-Jihad yaitu anggota jungut diberi upah 10 % dan diberi tambahan antara Rp 10.000,00-Rp 30.000,00. Upah yang diberikan tersebut sudah mengalami beberapa kali perubahan, waktu pertama kalinya upah anggota jungut diberi 5 % dan pada selang beberapa waktu berubah menjadi 10 % serta pada saat ini mengalami perubahan lagi menjadi 10 % dan diberi tambahan antara Rp 10.000,00-Rp 30.000,00. Alasan tambahan upah tersebut untuk keperluan anggota jungut diwaktu melakukan pengambilan dana dari donatur, misalnya untuk keperluan membeli bensin dan makanan dalam bekerja. Pelaksanaan pemberian upah anggota jungut di Yayasan Al-Jihad yaitu pada saat pekerjaannya sudah selesai, tepatnya pada waktu melaporkan hasil penggalian dananya ke direktur DASA pada waktu akhir bulan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ketentuan pemberian upah anggota jungut di Yayasan Al-Jihad sudah sesuai dengan ketentuan yang ada karena upah tersebut sudah hampir mencapai 12, 5 %, karena dalam peraturan Islam yang ada upah seorang amil zakat, infaq dan shadaqah ditentukan sebesar seperdelapan (12,5 %) dari hasil kerjanya. Selain itu pelaksanaan pemberian upah anggota jungut di Yayasan Al-Jihad sudah sesuai dengan syarat-syarat pengupahan yang ada yaitu upah diberikan diwaktu pekerjaannya sudah selesai.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Tujuan Penelitian	15
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	15
H. Definisi Operasional.....	16
I. Metode Penelitian	18
J. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II UJRAH (UPAH)

A. Ujarah (Upah).....	25
1. Pengertian ujarah (Upah).....	25
2. Hukum upah-mengupah	30
3. Hak menerima upah	31
4. Upah dalam pekerjaan ibadah	31
5. Gugurnya upah	34
B. Zakat	36
1. Pengertian zakat	36
2. Orang yang berhak menerima zakat	37
3. Pengurus zakat (amil zakat).....	39

BAB III UPAH JURU PUNGUT DONATUR DANA SOSIAL DI YAYASAN AL-JIHAD SURABAYA

A. Gambaran Umum Yayasan Al-Jihad Surabaya	40
1. Letak geografis Yayasan Al-Jihad Surabaya.....	40
2. Sejarah berdirinya Yayasan Al-Jihad Surabaya	40
3. Visi dan misi Yayasan Al-Jihad Surabaya.....	46
4. Struktur organisasi Yayasan Al-Jihad Surabaya.....	47
B. Ketentuan dan pelaksanaan pemberian upah anggota jungut donatur DASA di Yayasan Al-Jihad Surabaya.....	50
1. Latar belakang adanya dana sosial di Al-Jihad Surabaya	50

D. Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Adanya Dana Sosial Di Yayasan Al-Jihad Surabaya	68
E. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Upah Juru Pungut Donatur Dana Sosial Di Yayasan Al-Jihad Surabaya.....	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Dalam rangka melaksanakan tolong-menolong sesama manusia, orang-orang yang telah mendapat karunia Allah dalam bentuk rezeki yang banyak memberikan sebagian rezeki yang diterimanya kepada orang-orang atau pihak-pihak yang membutuhkan. Pemberian dari yang berkelebihan itu dapat ditempuh melalui beberapa cara yang cara-cara tersebut lazim berlaku dalam islam, antara lain dengan nama sadaqah, hadiah, hibah dan zakat. Salah satu dari sekian macam pemberian itu yang sunnah hukumnya adalah sadaqah. Sadaqah adalah memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan pada masa hidupnya tanpa minta imbalan, tujuannya hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah

[illegible]

SWT.⁴ Keharusan saling tolong-menolong itu didasarkan pada suatu kenyataan bahwa manusia itu saling membutuhkan. Rasa saling membutuhkan muncul dari kodrat manusia yang tidak sempurna dan lemah. Oleh karena itu, dalam rangka untuk menutupi kekurangan yang terdapat pada dirinya, ia memerlukan bantuan orang lain. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah Al-Maidah ayat 2.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوْا شَعْبِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا سِجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁵

⁴ Qol'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khattab r.a.* (Jakarta: Rajawali Perss.Cet. Pertama. 1999). 487.

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 141-142

direktur dasa.¹² Dengan berkembangnya waktu pihak Yayasan merubah tradisi tersebut dengan setiap akhir bulan diadakan suatu laporan jungut untuk menyetorkan hasil dari pengambilan dana dari donatur serta jungut langsung menerima upah 10 % dari hasil pengambilan dana dari donatur di waktu laporan tersebut.¹³ Di masa jabatan Bapak Drs. Sukron Jazilan M.Ag sebagai direktur DASA pada saat ini melalui kebijakannya beliau upah juru pungut ditambah berkisaran Rp 10.000,00 – Rp 30.000,00. Setiap juru pungut tidak sama menerima kelebihan yang diberikan dari direktur tersebut. Penambahan upah itu dilakukan karena direktur DASA memandang jauh dekatnya jungut mengambil dana dari donatur DASA dan perkembangan ekonomi.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, bagaimana hukumnya anggota juntut menerima upah 10 % dan mendapat kelebihan upah Rp 10.000,00-Rp 30.000,00 dari direktur DASA? serta kelebihan upah itu dari kebijakan direktur DASA sendiri?. Maka dari sinilah penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahasnya dengan analisis hukum Islam yang ada.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, dapat diketahui bahwa pokok yang ingin dikaji adalah :

¹² Drs. KH. M. Syukron Djazilan Badri, M.Ag, sebagai direktur dana sosial (dasa), *Wawancara*, Surabaya, tanggal 19 April 2011.

¹³ Ibid.

1. Latar belakang Yayasan Al-Jihad menyelenggarakan layanan dana sosial (dasa).
2. Bagaimana proses mekanisme pengambilan dana sosial (dasa).
3. Bagaimana sistem perekrutan anggota juru pungut (jungut).
4. Pelaksanaan pemberian upah juru pungut (jungut) donatur dana sosial (dasa).
5. Analisis hukum islam terhadap ketentuan dan pelaksanaan pemberian upah juru pungut (jungut) donatur dana sosial (dasa) di Yayasan Al-Jihad Surabaya.

C. Batasan Masalah

Masalah upah masih bersifat global, sehingga diperlukan suatu pembatasan masalah dalam pembatasannya, dan dalam hal ini pembatasan masalahnya adalah :

1. Bagaimana ketentuan dan pelaksanaan pemberian upah juru pungut (jungut) donatur dana sosial (dasa) di Yayasan Al-Jihad Surabaya ?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap ketentuan dan pelaksanaan pemberian upah juru pungut (jungut) donatur dana sosial (dasa) di Yayasan tersebut ?

Dengan demikian format masalahnya adalah ketentuan dan pelaksanaan pemberian upah jungut donatur DASA di Yayasan Al-Jihad Surabaya. Yang

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- ## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.¹⁴

Setelah menelusuri melalui kajian pustaka, penulis pernah membaca skripsi saudara Alfian Maulana (2010) yang berjudul “ **Praktek Penghimpunan Dana Infaq Di Pondok Pesantren Putri An – Najiyah Surabaya (Studi Analisis Hukum Islam)**”.¹⁵ Dalam skripsi tersebut bahwa santri (penghimpun atau

¹⁴ Abuddin Nata, *Metodologi Penelitian Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada), 135.

¹⁵ Alfian Maulana, *Praktek Penghimpunan Dana Infaq Di Pondok Pesantren Putri An – Najiyyah Surabaya (Studi Analisis Hukum Islam)*, (Surabaya : skripsi, 2010).

penggali dana) mendapat upah dari sisa pembayaran rekening air, listrik, telephone, perawatan gedung dan memenuhi kebutuhan santri selama berada di pondok tetapi seiring perkembangan waktu santri (penghimpun atau penggali dana) mengambil upah sendiri dari hasil penghimpunan dana yang diperolehnya selama penghimpunan dana. Selain judul skripsi di atas penulis juga menemukan skripsinya saudara Nurma Hanik (2010) yang berjudul **“ Persepsi Pemahat Patung Terhadap Upah Mematung Di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto (Studi Analisis Hukum Islam).”**¹⁶ Dalam skripsi tersebut bahwa upah mematung hukumnya boleh dengan alasan tidak ada pekerjaan lain, pemahat tidak tahu tentang keharaman patung dalam hukum islam karena pendidikannya rendah dan keahliannya hanya bisa memahat patung untuk memenuhi kebutuhannya. Serta di dalam skripsi Thoriq Sholikhul Karim (2006) yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan (Studi Kasus PT. Karya Toha Putra Semarang)”**.¹⁷ Di dalam skripsi ini sistem upah karyawan PT. Karya Toha Putra Semarang diselenggarakan atas dasar golongan yang meliputi golongan I, II, III dan IV yang sistem penghitungannya memiliki kesamaan. Namun ada aspek yang tidak bisa dipublikasikan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem upah di PT. Karya Toha Putra Semarang tidak seluruhnya sesuai dengan hukum Islam.

¹⁶ Nurma Hanik, *Persepsi Pemahat Patung Terhadap Upah Memahat Di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto (Studi Analisis Hukum Islam)*, (Surabaya: skripsi, 2010).

¹⁷ Thoriq Sholikhul Karim, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan (Studi Kasus P.T. Karya Toha Putra Semarang)*", (Semarang: skripsi, 2006).

Sedangkan dalam upah jungut donatur DASA di Yayasan Al- Jihad Surabaya adalah yang digunakan akad kerjasama antara pengurus Yayasan dengan anggota jungut, dalam pemberian upah (kerja atau tenaga) kepada jungut dari hasil pengambilan dana dari donatur, yang di mana petugas jungut mendapatkan upah 10 % dari hasil pengambilan dana dari donatur.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan dan pelaksanaan pemberian upah anggota jungut donator DASA di Yayasan Al-Jihad Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam terhadap ketentuan dan pelaksanaan pemberian upah anggota jungut donatur DASA di Yayasan tersebut.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini di samping berguna untuk mencoba mengaplikasikan ilmu yang telah penulis peroleh, juga diharapkan berguna minimal dua aspek, yaitu :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pengetahuan mengenai penghimpunan dana sosial bagi pengembangan *khazanah* dan kepustakaan islam pada umumnya dan al-madaniyah pada khususnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai analisis ketentuan dan pelaksanaan pemberian upah anggota jungut DASA ini dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang muamalah pada umumnya dan ketentuan dan pelaksanaan upah anggota jungut pada khususnya.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin menganalisis lebih jauh tentang konsep penggalan dana sosial menurut syariat islam yang berlaku.

H. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Upah Juru Pungut Donatur Dana Sosial Di Yayasan Al-Jihad Surabaya”. Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman serta agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini.

Hukum Islam : peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.¹⁸ Pada kali ini penulis menggunakan hukum islam sunnah 4 madzab (Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanafiyyah dan Hambaliyyah).

Upah : uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai
balas jasa.¹⁹

Juru Pungut : Petugas penghimpunan dana di Yayasan Al-Jihad Surabaya yang tugasnya mengambil zakat mall (zakat harta), zakat fitrah, infaq, shadaqoh, wakaf dan hibah dari donatur.

¹⁸ Zainudin Ali, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 3.

¹⁹ Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi terbaru*, 1250.

Donatur : Penderma²⁰ atau bisa disebut dalam hal ini orang yang menyumbang sebagian hartanya berupa zakat, infaq, hibah dan shadaqah kepada Yayasan Al-Jihad Surabaya.

Dana Sosial : Dana yaitu uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk sesuatu maksud²¹. Sosial yaitu (segala sesuatu) yang mengenai masyarakat²². Dalam kali ini yang dimaksud dana soaial yaitu dana untuk memenuhi kebutuhan anak panti asuhan dan pembangunan di Yayasan Al-Jihad Surabaya.

Jadi maksudnya ialah penyelidikan terhadap ketentuan dan pelaksanaan upah anggota jungut donatur DASA di Yayasan Al-Jihad yang dilaksanakan setiap akhir bulan.

²⁰ Pius a Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 122.

²¹ A.m. Lapidus, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 225.

²² Ibid. hal 961

- ### 3. Sumber data

a. Sumber data primer, yaitu pengurus Yayasan Al-Jihad Surabaya, pengurus DASA, donatur serta anggota jungut.

Sumber data sekunder berasal dari buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah praktek penghimpunan dana sosial, yaitu:

1. Al-Qur'an dan terjemahannya.
2. Al-Hadits.
3. Ahmad Wadi Muslich, *Fiqih Muāmalat*, (Jakarta : Amzah, 2010).
4. Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muāmalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008).

5. Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedia Fiqih Umar Bin Khattab ra*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999).
 6. Hendi Suhendi, *Fiqh Muāmalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).
 7. Hasby Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muāmalah*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1996).
 8. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13*, (Bandung : PT Alma'arif, 1988).
 9. Racmat Syafei, *Fiqh Muāmalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001).
 10. Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muāmalah Kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002).
 11. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muāmalat*. (Jakarta : Prenada Media Group, 2010)
4. Teknik pengumpulan data
- Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
- a. Observasi

Yang dimaksud dengan observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban terhadap fenomena-fenomena yang ada.²⁵ Teknik ini digunakan untuk mengetahui dan memahami secara langsung ketentuan dan

²⁵ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), 167.

pelaksanaan pemberian upah anggota jungut donatur DASA di Yayasan Al-Jihad Surabaya.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan atau responden.²⁶ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah berdirinya DASA di Yayasan Al-Jihad Surabaya serta sistematika ketentuan dan pelaksanaan pemberian upah anggota jungut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dan cenderung menjadi data sekunder. Penggunaan dokumentasi adalah dengan cara mengumpulkan data meliputi data tertulis misalnya buku-buku, majalah, dokumen, foto, dan sebagainya. Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa dokumen tentang ketentuan dan pelaksanaan pemberian upah anggota jungut dan dokumen tertulis lainnya.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta. Cet. 13, 1998), 145.

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis data yang sudah diperoleh perlu diolah, adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data, antara lain:

1. Editing

Editing yaitu mempersiapkan naskah yang siap cetak atau siap terbit (dengan memperhatikan terutama segi ejaan, diksi, dan struktur kalimat)²⁷. Didalam skripsi ini penulis memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan yang sudah penulis dapatkan.

2. Organizing

Organizing yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya, untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktek pemberian upah anggota jungut donator DASA di Yayasan Al-Jihad Surabaya.

6. Teknik Analisis Data

Setelah selesai mengumpulkan data langkah selanjutnya adalah analisis data terhadap data dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode sebagai berikut:

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ketiga, 2005), 283.

a. Metode Deskriptif

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain.²⁸ Metode ini digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan terhadap ketentuan dan pelaksanaan pemberian upah anggota jungut donatur DASA di Yayasan Al-Jihad Surabaya.

b. Metode Deduktif

Penulis dalam hal ini menguraikan mengenai ketentuan dan pelaksanaan pemberian upah anggota jungut donatur DASA di Yayasan Al-Jihad Surabaya. Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang sifatnya umum yakni suatu peristiwa atau data tertentu menuju ke kebenaran yang sifatnya khusus. Di mana ketentuan dan pelaksanaan pemberian upah anggota jungut donatur DASA di Yayasan Al-Jihad Surabaya menuju pendekatan kebenaran pemberian upah yang sesuai dengan hukum islam untuk diambil sebuah kesimpulan.

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 11.

J. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka perlu dibagi menjadi lima bab bagian, yang masing-masing bab dibagi lagi kedalam sub-sub dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, ialah bab pendahuluan. Bab ini berisi bahan tentang gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua, ialah bab tentang kerangka teori. Bab ini mengemukakan landasan teori menurut hukum islam tentang Upah (ujrah) dan tentang amil zakat.

Bab Ketiga, merupakan laporan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, meliputi: letak geografis Yayasan Al-Jihad, sejarah berdirinya Yayasan Al-Jihad, visi dan misi Yayasan Al-Jihad, struktur organisasi Yayasan Al-Jihad serta mekanisme ketentuan dan pelaksanaan pemberian upah anggota jungut donatur DASA di Yayasan Al-Jihad yaitu terdiri dari: latar belakang adanya DASA di Al-Jihad Surabaya, Struktur kepengurusan DASA Al-Jihad Surabaya, Prosedur perekrutan anggota jungut donatur DASA Al-Jihad Surabaya, Prosedur penghimpunan DASA Al-Jihad Surabaya, Ketentuan dan pelaksanaan pemberian upah anggota jungut donatur

DASA di Yayasan Al-Jihad Surabaya serta dampak adanya DASA di Yayasan Al-Jihad Surabaya.

Bab Keempat, ialah bab yang mengemukakan analisis hukum Islam terhadap upah anggota jungut donatur DASA di Yayasan Al-Jihad Surabaya yaitu Analisis hukum islam terhadap prosedur penghimpunan DASA donatur DASA di Yayasan Al-Jihad Surabaya, Analisis hukum islam terhadap ketentuan pemberian upah anggota jungut donatur DASA di Yayasan Al-Jihad Surabaya, Analisis hukum islam terhadap pelaksanaan pemberian upah anggota jungut donatur DASA di Yayasan Al-Jihad Surabaya, analisis hukum islam tentang dampak adanya DASA di Yayasan Al-Jihad Surabaya serta analisis hukum islam terhadap sistem pemberian upah anggota jungut donatur dana sosial DASA di Yayasan Al-Jihad Surabaya.

Bab Kelima, ialah bab penutup, memuat kesimpulan dan saran.

1. Pengertian Ujrah (Upah)

a. Upah harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak yang bertransaksi (sejak awal). Oleh karena itu, tidak boleh menyewa rumah dengan bayaran merenovasi bagian-bagian yang perlu diperbaiki, menyewa mobil dengan upah mobil dengan imbalan mereparasinya sampai dapat hidup, dan juga tidak boleh menyewa hewan tunggangan dengan imbalan memberinya makan. Upah seperti ini diketahui secara pasti. Termasuk upah yang tidak jelas adalah membayar upah dengan sesuatu yang dihasilkan dari pekerjaan orang yang disewa. Misalnya, seseorang disewa untuk menyembelih dan menguliti kambing dengan imbalan kulitnya atau bagian lain dari kambing itu. Transaksi ini tidak sah karena belum diketahui beberapa tebal kulit kambing itu atau seberapa banyak bagian yang akan dijadikan upah. Tidak sah juga bila seseorang disewa untuk menggiling sejumlah gandum dengan imbalan sebagian dari tepung yang dihasilkannya, seperempat atau seperlimanya.

Al-Daruquthni dan yang lainnya meriwayatkan bahwa Nabi SAW. Melarang qafiz al-thahhan.³⁰ Kalimat ini ditafsirkan sebagai pemberian upah menumbuk biji gandum dengan tepung hasil tumbukannya. Akan tetapi, jika dia disewa dengan upah satu bagian biji gandum, lalu sisanya ditumbuk, transaksinya sah. Hal ini disebabkan tidak adanya pelarangan, yaitu ketidakjelasan upah dan orang yang diupah bekerja untuk dirinya sendiri. Yang termasuk dalam larangan ini adalah praktik-praktik berikut ini:

- Orang yang memanen tanaman, baik langsung oleh tangannya maupun menggunakan alat, diberi upah dari sebagian yang dihasilkannya, 10% atau semisalnya.
- Orang yang mengumpulkan dan sumbangan untuk organisasi dan lainnya diupah dari sumbangan yang berhasil dikumpulkannya, 20% dan semisalnya.

³⁰ Sunan Al-Daruquthni, *Kitab Al-Buyu'* 93:47, no.195). Sunan Al-baihaqi Al-Kubra, *Kitab Al-Buyu'*, bab "Al-Nahy'an'Ashb Al-Fahl", (5:339).

- d. Upah harus dapat dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikkan), seperti serangga dan dua biji gandum, karena berbahaya, seperti binatang-binatang buas, maupun karena diharamkan pemakaiannya secara syari'at, seperti alat-alat permainan (yang melalaikan), patung dan gambar-gambar. Benda-benda tersebut dan yang semisalnya tidak bermanfaat dan tidak dianggap sebagai harta yang berharga. Benda-benda di atas tidak sah ditukarkan dengan harta yang bernilai. Sementara itu, manfaat yang menjadi objek akad sewa-menyewa (*ijārah*) adalah harta yang bernilai. Oleh sebab itu, barang-barang tersebut tidak boleh ditukarkan dengan sesuatu yang tidak bernilai.
- e. Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu, baik karena harta itu berupa hak milik maupun *wakalah* (harta yang dikuasakan). Jika upah tidak berada di bawah kuasa orang yang berakad, ia tidak sah dijadikan upah sewa.
- f. Para ulama Mazhab Hanafiah mensyaratkan bahwa upah tidak boleh berbentuk manfaat yang serupa dengan manfaat yang diakadkan. Misalnya, menyewakan rumah untuk ditinggali dengan upah sewa yang sama, yaitu meninggali rumah penyewa. Praktek ini mengandung unsur riba. Jika upah sewa itu dalam bentuk yang berbeda, seperti

menyewakan rumah dengan upah sewa menjahitkan baju, transaksi diperbolehkan.³³

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyariatkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.³⁴

Imam Madzab berbeda pendapat tentang upah ada kadar ukuran (jauh dekatnya jarak) :

- a) Hanafiyah berpendapat jika ia membawanya dari perjalanan sejauh tiga hari perjalanan maka ia berhak mendapatkan upah sebesar 40 dirham. Sedangkan kalau kurang dari itu, hendaknya diserahkan kepada hakim tentang upahnya.
- b) Malikiyah berpendapat ia mendapat upah yang umum.

³³Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, 159-163

³⁴Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, 121

- c) Hambaliyah mempunyai dua pendapat, yaitu; pertama, 1 dinar atau 12 dirham dan tidak ada perbedaan antara jarak yang jauh atau dekat, serta tidak dibedakan antara ditemukan dikota atau diluar kota. Kedua: Jika dibawa dari kota maka upahnya 10 dirham, sedangkan jika dari luar kota maka upahnya 40 dirham.
- d) Syafi'i berpendapat tidak berhak apa-apa kecuali dengan syarat dan ditentukan upahnya.³⁵

2. Hukum Upah-Mengupah

Upah mengupah atau *ijārah 'ala al-a'māl*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijārah 'ala al-a'māl* terbagi dua, yaitu:

a. *Ijārah Khusus*

Ijārah khusus yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja.

Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b. *Ijārah Musyatarik*

Ijārah musyatarik yaitu *ijārah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.³⁶

³⁵ Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzab*, (Bandung: hasyimi Pers, Cet. XIII, 2010), 319-320

³⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muāmalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia. Cet. 10, 2001), 133-134

3. Hak Menerima Upah

- a) Selesai bekerja. Berdalih pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa nabi SAW bersabda:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْطُوا الْآجِرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: *Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).*³⁷

- b) Mengalirnya manfaat, jika *ijārah* untuk barang. Apabila terdapat kerusakan pada *'ain* (barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikit pun ada waktu yang berlalu, *ijārah* menjadi batal.
- c) Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
- d) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.³⁸

4. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah

Para ulama berbeda sudut pandang dalam hal upah atau imbalan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan ketaatan kepada Allah. Madzab Hanafi berpendapat bahwa *al-ijārah* dalam perbuatan ibadah

³⁷Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Tarjamah Bulūḡul Marām*, (Surabaya: Putra Al-Ma'arif. Cet. X, 1992), 476

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, 21

atau ketaatan kepada Allah seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, atau membaca al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah orang tua yang menyewa, menjadi muadzin, menjadi imam, dan lain-lain yang sejenis haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

أَقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا نُنَاجِيهِ

“Bacalah olehmu al-Quran dan janganlah kamu cari makan dengan jalan itu”,

Pada hadis lain Rasulullah SAW bersabda:

وَأَنِ اتَّخِذْ مُوَدَّةً فَلَا تَأْخُذْ مِنَ الْأَذَانِ أَجْرٌ

“Jika kamu mengangkat seseorang menjadi muadzin maka janganlah kamu ambil (kamu beri) dari adzan itu suatu upah”.

Perbuatan seperti adzan, shalat, haji, puasa, membaca al-Quran, dan dzikir adalah tergolong perbuatan untuk *taqarrub* kepada Allah, karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah.

Sebagai ilustrasi sering kita jumpai di beberapa daerah di Indonesia apabila salah seorang muslim meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggal wafat meminta kepada para santri atau tetangga untuk membaca Al-Quran di rumah atau di makam selama tiga malam, tujuh malam, atau bahkan ada yang sampai empat puluh malam. Setelah selesai membaca Al-

Madzab Maliki, Syafi'i, dan Ibnu Hazm, membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar Al-Quran dan kegiatan-kegiatan sejenis, karena hal ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui (terukur) dan dari tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Al-Quran dan kegiatan sejenis, baik secara bulanan atau secara sekaligus dibolehkan dengan alasan tidak ada *nash* yang melarangnya.⁴²

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ājir*, apabila barang yang ada ditangannya rusak atau hilang. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila *ājir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa atau di hadapannya maka ia tetap memperoleh upah, karena barang tersebut ada di tanga penyewa (pemilik). Sebaliknya, apabila barang tersebut ada di tangan *ājir*, kemudian barang tersebut rusak atau hilang, maka ia (*ājir*) tidak berhak atas upahnya kerjanya. Ulama Hanafiyah hampir sama pendapatnya dengan Syafi'iyah. Hanya saja pendapat mereka diperinci sebagai berikut:

⁴²Hendi Suhendi, *Fiqih Muāmalah*, 120

1. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi dapat diartikan berkembang dan berkah, seperti dalam ungkapan berikut: زَكَاتُ الرِّزْقِ (tanaman itu berkembang), زَكَاةُ النَّفَقَةِ (nafkah itu berkah), dan زَكَاةُ فُلَانٍ (si fulan banyak kebajikannya). Selain itu, zakat dapat diartikan mensucikan, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿١٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.* (QS. Asy-Syams (91):9)⁴⁵

Maksud ayat diatas, yakni membersihkan dari segala dosa. Zakat juga diartikan memuji, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ
أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ فَلَا
تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى ۚ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunanNya. dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu

⁴⁴ *Ibid.*, Juz 4., 777

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 896

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 264

1. Selama kurun waktu ini, perkembangan pondok sebagai berikut :

2. Tanah yang sudah ada bangunannya seluas 887 M2 berupa :

- ### 3. Penghuni pondok:

- Santri putra sebanyak 195 Mahasiswa
- Santri putri sebanyak 182 Mahasiswi
- Anak yatim (putra-putri) sebanyak 17 anak.

Jumlah di atas selalu berubah, data tersebut merupakan data terbaru pada bulan Mei 2011. Pada tanggal 15 April 2000, H. Saimi Saleh atas nama Yayasan Al-Jihad Surabaya membuka secara resmi :

1. **Penerimaan Santri Mahasiswa Pondok Pesantren Al-Jihad**
2. **Undian Haji Pondok Pesantren Al-Jihad**

Tahun 2000 inilah awal mula kepengurusan santri. Dan yang mengemban amanah sebagai ketua adalah ustadz Khoirul Adhim, S.Hi selama dua periode. Terpilihnya beliau adalah atas mandat langsung dari pengasuh waktu itu.

Pada tahun 2002-2003 Lambat laun tapi pasti, estafet kepemimpinan pun dilakukan sebagai bentuk dari organisasi yang demokratis. Dimana ketua dipilih dari, oleh dan untuk santri. Akhirnya, terpilihlah ustadz Moh. Ikhwan, S.S selama satu periode.

Pada tahun 2003-2005, seiring dengan bertambahnya jumlah santri, maka bertambah berat tugas yang diemban oleh pengurus. Maka dibentuklah kepengurusan periode berikutnya, yang ternyata, berdasarkan keputusan musyawarah santri bahwa kepengurusan berlangsung selama dua periode. Sebagai 'Presiden' pada waktu itu adalah ustadz T. Abdul Hamid, S.Hi.

Pada tahun 2005-2006 Sebagai masyarakat santri yang terus-menerus belajar tanpa henti. Keputusan santri untuk masa kepengurusan cukup satu

periode pun terulang kembali. Yaitu Pada masa kepengurusan ustadz Moh. Ali Hasan, S.Pdi.

Perlu dicatat, bahwa sebuah keberhasilan organisasi bukan dinilai seberapa lama kepengurusan tersebut berlangsung. Akan tetapi, masyarakat yang dipimpin itulah yang menjadi tolak ukur. Sejauhmana keberadaan kepengurusan itu bisa dirasakan kehadirannya oleh seluruh komponen masyarakat santri dalam rangka mengatur keseimbangan dan keharmonisan demi tujuan, visi & misi yang telah dicetuskan.

Pada tahun 2006-2007 sejarah setahun silam, bersamaan dengan peringatan hari Ibu pada 1 Mei 2006, saat itu pula pada senin malamnya ba'da isya' berlangsung pemilihan ketua baru, kepengurusan periode 2006-2007. dan terpilih sebagai ketua adalah Farhan, tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang pada waktu itu sedang duduk disemester VI. Akhirnya pelantikan kepengurusan periode ini dilaksanakan pada sabtu (06/05/06) setelah pengajian subuh oleh pengasuh di Aula PPM Al-Jihad, bersamaan dengan periode kepengurusan putri pada waktu itu.

Pada tanggal 22 Maret 2007 Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya telah berusia 9 tahun. Dan hingga kini tercatat sekitar 300-an santri putra-putri yang berasal dari berbagai daerah Jawa dan luar Jawa. Serta santri alumnni berjumlah sekitar 60-an, yang telah diadakan temu santri

alumni untuk pertamakalinya pada ahad (08/04/07) di Aula PPM Al-Jihad sekitar pukul 13.00 WIB dan atau pasca pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad 1428 H yang lalu dan pada tahun 2011 jumlah alumninya kurang lebih sudah mencapai 200 an.

3. Visi dan Misi Yayasan Al-Jihad Surabaya

Adapun visi dan misi Yayasan Al-Jihad, salah satunya tertuang dalam visi dan misi pondok pesantren Al-Jihad yaitu :

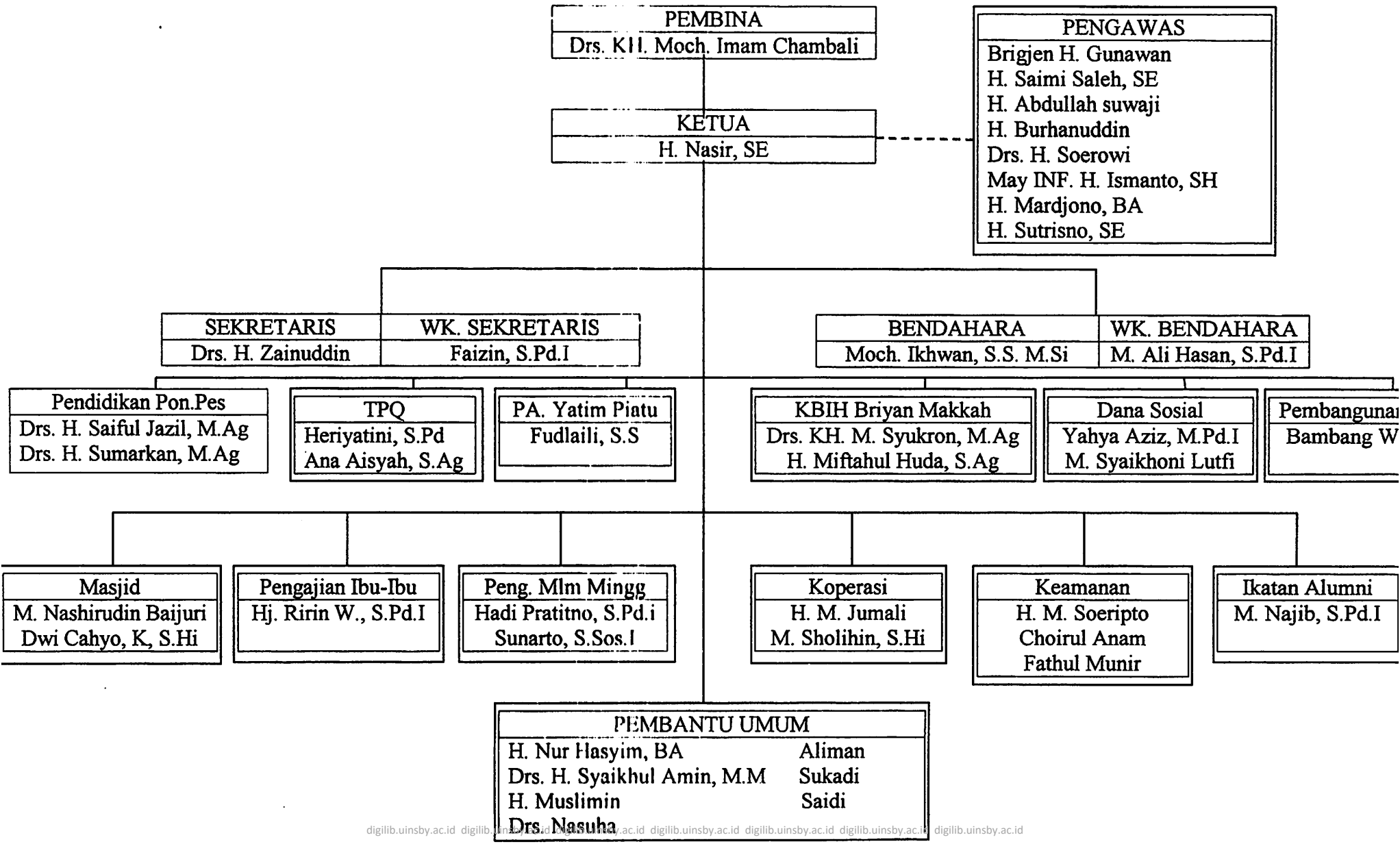
Visi

- a. *Muhāfadhotu ‘ala qadimis-shālih wal ahdzu bil jadidil ashlah*, yaitu mengikhtiarkan pondok pesantren mahasiswa Al-Jihad Surabaya menjadi lembaga pendidikan berkarakter Islam yang akan menjadi tempat bertemunya unsur tradisional dengan modernis.
- b. Membangun mental dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. Mengimplementasikan fungsi khalifah Allah di muka bumi (diwujudkan dalam sikap proaktif, kreatif, dan inovatif) yang dibangun atas dasar keikhlasan dan *akhlaqul karimah*.

Sedangkan untuk misi Yayasan Al-Jihad Surabaya adalah:

- a. Melaksanakan dan meningkatkan pendidikan, pengajaran, dan dakwah.
- b. Menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki *Ghirah Islāmiyah* (semangat keislaman) yang tinggi dalam melaksanakan ajaran agama.

STRUKTUR ORGANISASI YAYASAN AL-JIHAD SURABAYA PERIODE 2007-2011



**B. Ketentuan Dan Pelaksanaan Pemberian Upah Juru Pungut Donatur Dana Sosial
Di Yayasan Al-Jihad Surabaya**

1. Latar belakang adanya dana sosial di Yayasan Al-Jihad Surabaya

Dengan membaca *“Bismillāhirrahmānirrahim”* Pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2001 Bapak H. Gumawan secara resmi telah membuka panti asuhan di Yayasan Al-Jihad Surabaya, sejak pada tanggal itulah Yayasan Al-Jihad menerima anak yatim piatu diberbagai penjuru Indonesia. Semua biaya dan kebutuhan sehari-hari anak yatim piatu akan ditanggung oleh pihak Yayasan.

Dengan berdirinya panti asuhan di Yayasan Al-Jihad, masyarakat luas telah mengetahuinya dan berkeinginan untuk membantu Yayasan untuk membiyai kebutuhan anak panti asuhan sehari-hari, pada waktu itu masyarakat sangat antusias dalam mengeluarkan shadaqahnya untuk membantu anak panti asuhan yang ada di Yayasan Al-Jihad Surabaya. Dengan semangatnya masyarakat itulah akhirnya pengurus Yayasan membentuk sebuah pengurus dana sosial, yang dimana kepengurusannya itu dibawah naungan Yayasan Al-Jihad Surabaya, yang dimana saat ini yang menjabat sebagai ketua dana sosial atau disebut direktur dana sosial adalah Bapak Drs. KH. M. Syukron Djazilan Badri, M.Ag.⁵³ Dana Sosial Al-Jihad Surabaya di bawah bimbingan dan arahan Bpk. Drs. KH. Moch. Imam

⁵³ Drs. KH. M. Syukron Djazilan Badri, M.Ag, sebagai direktur dana sosial (dasa), *Wawancara*, Surabaya, tanggal 19 April 2011.

Adapun struktur kepengurusan dana sosial Al-Jihad Surabaya sebagai berikut:

Reporter : M. Syamsul Rizal

[illegible]

mempunyai kendaraan sepeda motor sendiri dan harus mempunyai SIM (surat izin mengemudi).

Sebelum melakukan perekrutan anggota juru pungut oleh direktur dana sosial terlebih dahulu direktur dana sosial mengumumkan kepada santri bahwa akan ada lowongan kerja menjadi tim juru pungut donatur dana sosial di Yayasan Al-Jihad. Yang dimana nantinya prosedur perekrutannya santri disuruh mendaftar langsung kepada direktur dana sosial dan waktu itu juga langsung diinterview. Sesudah direktur dana sosial melakukan interview dan sekaligus menyeleksi nanti yang diterima menjadi tim juru pungut akan diberitahu langsung melalui surat oleh direktur dana sosial.⁵⁵ Pertama kalinya yang menangani prosedur perekrutan anggota juru pungut adalah ketua Yayasan akan tetapi pada saat ini direktur dana sosial diberi wewenang dalam perekrutan anggota juru pungut. Selain prosedur di atas biasanya santri yang sudah bekerja sebagai juru pungut jika mau keluar dari anggota juru pungut bisa mencari pengganti sendiri dari santri dan kemudian melapor ke direktur dana sosial bahwa mau keluar dari pekerjaan juru pungut dan sekaligus mengajak penggantinya untuk diinterview oleh direktur dana sosial. Anggota juru pungut diprioritaskan dari santri yang mondok di Pesantren Mahasiswa AL-Jihad karena pihak Yayasan mempunyai alasan-alasan tersendiri yaitu melatih para santri berkomunikasi dengan masyarakat

⁵⁵ Drs. KH. M. Syukron Djazilan Badri, M.Ag, sebagai direktur dana sosial (dasa), *Wawancara*, Surabaya, tanggal 19 April 2011.

luas, mengingatkan santri bahwa mencari uang itu susah, dengan menjadi anggota jungut yang dulunya minta uang dari orang tua diharapkan bisa mandiri dan mengerti arti nilai uang yang sebenarnya, melatih para santri membuka potensi usaha.⁵⁶

4. Prosedur penghimpunan dana sosial di Yayasan Al-Jihad Surabaya

Menjadi seorang donatur di suatu lembaga panti asuhan merupakan salah satu impian seseorang, menjadi donatur untuk kebaikan merupakan hal yang mulia di hadapan Allah SWT, apalagi ada suatu pepatah yang mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan dibawah.

Adapun di Yayasan Al-Jihad Surabaya telah membuka layanan dana sosial bagi donatur yang akan menyalurkan hartanya, dimana para donatur bisa menyalurkan infaq, shadaqoh, zakat mall dan hibahnya kepada Yayasan Al-Jihad. Dana yang sudah terkumpul dari para donatur tersebut pihak Yayasan mempergunakannya untuk menghidupi anak yatim piatu, dakwah sosial umat Islam dan dipergunakan untuk pembangunan gedung di Yayasan Al-jihad. Sebelum para calon donatur menjadi donatur di Yayasan AL-Jihad, para donatur terlebih dahulu mengisi formulir pendaftaran menjadi donatur Yayasan Al-Jihad, adapun yang akan menjadi donatur tetap mengisi formulir pendaftaran menjadi donatur, sedangkan yang menjadi donatur insedentil tidak mengisi formulir pendaftar. Di Yayasan AL-Jihad menjadi seorang

⁵⁶ Bapak Nasir, SE, sebagai ketua Yayasan Al-Jihad Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, tanggal 12 Juni 2011.

donatur ada dua pilihan yaitu menjadi donatur tetap dan donatur tidak tetap (insedentil), adapun prosedur penghimpunan dananya yaitu.⁵⁷

1. Para donatur bisa didatangi dirumahnya masing-masing oleh petugas Yayasan, dalam kali ini yang menjadi petugasnya adalah anggota juru pungut donatur dana sosial Yayasan Al-Jihad.
2. Para donatur bisa mendatangi kantor Yayasan AL-Jihad Sendiri.
3. Bisa menyumbang pada waktu pengajian setiap malam minggu pahing di Yayasan Al-Jihad.

Setiap donatur yang sudah menshadaqohkan hartanya, baik donatur tetap dan donatur tidak tetap (insedentil) akan diberi kwintansi oleh anggota jungut dan akan diberi majalah DASA. Adapun didalam majalah DASA pada halaman terakhir ada laporan perolehan uang dari donatur.

5. Ketentuan dan pelaksanaan pemberian upah juru pungut donatur dana sosial di Yayasan Al-Jihad Surabaya

Sejak terbentuknya pengurus dana sosial dan sekaligus dari hasil musyawarah pengurus Yayasan Al-Jihad bahwa tim juru pungut pertama kalinya mendapat 5% tetapi dengan perkembangnya waktu dan hasil studi dengan lembaga sosial yang lain pada saat ini upah anggota jungut tidak 5% lagi melainkan menjadi 10% dari hasil yang didapat dari donatur.⁵⁸ Yayasan

⁵⁷ Bapak *Nasir*, SE, sebagai ketua Yayasan Al-Jihad Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, tanggal 12 Juni 2011.

⁵⁸ Bapak Nasir, SE, sebagai ketua Yayasan Al-Jihad Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, tanggal 12 Juni 2011.

Al-Jihad adalah suatu lembaga suwasta maka mengenai ketentuan upah tidak mengikuti standart UMR (Upah Minimum Regional) yang berlaku di kota Surabaya melainkan dari hasil musyawarah pihak Yayasan sendiri. Pengurus Yayasan memandang bahwa upah 10% itu sudah setara dengan pekerjaannya yang tidak terlalu berat sebagai juru pungut donatur, biasanya para juru pungut mengambil uang dari donatur antara tanggal 15 keatas setiap bulannya dan dilaporkan pada waktu akhir bulan kepada direktur dana sosial.⁵⁹ Donatur dana sosial Yayasan Al-Jihad setiap bulannya mengalami peningkatan, maka hal itu sangat mempengaruhi upah juru pungut juga menjadi meningkat.

Didalam pelaksanaan pemberian upah juru pungut dahulu tim juru pungut disuruh langsung memotong 10% dari hasil pengambilan uang donatur dan selanjutnya uangnya diberikan kepada ketua Yayasan tetapi pada saat ini kebiasaan itu dirubah menjadi sistem pengupahannya dilakukan setiap satu bulan sekali diwaktu akhir bulan, upah diberikan jika tim juru pungut terlebih dahulu melakukan laporan dari hasil pengambilan uang donatur kepada direktur dana sosial dan diwaktu laporan itu direktur dana sosial langsung memberikan upah 10% kepada juru pungut. Akan tetapi pada saat ini direktur dana sosial memberi kebijakan sendiri terhadap upah juru

⁵⁹ Ali Mahfudin, sebagai tim juru pungut dana sosial (dasa), *Wawancara*, Surabaya, tanggal 08 Juni 2011.

pungut yaitu upah juru pungut tidak 10% saja akan tetapi ditambah antara Rp 10.000,00-Rp 30.000,00. Penambahan upah dilakukan karena direktur dana sosial memandang untuk biaya bensin dan keperluan sebagainya, padahal diwaktu pertama dana sosial didirikan upah juru pungut ditetapkan 10% dan itu merupakan uang bensin dan sebagainya.

6. Dampak adanya dana sosial di Yayasan Al-Jihad Surabaya

a. Dampak bagi masyarakat luas (donatur)

2,5% dari harta kita terdapat hak orang lain yang wajib kita tunaikan. Dengan hal tersebut masyarakat luas mempunyai suatu kewajiban menyalurkan harta mereka kepada orang lain yang sangat membutuhkan, dalam hal ini untuk melayani kebutuhan umat Islam agar dana tersebut tersalur secara efektif, tepat sasaran dan memenuhi kaidah syari'ah yang goti' dana sosial Yayasan Al-Jihad menerima harta zakat, infaq atau shadaqoh.⁶⁰ Dengan adanya dana sosial di Yayasan Al-Jihad Surabaya masyarakat merasa mudah menyalurkan hartanya yang akan disalurkan, seperti Bapak Semi warga Jemursari mengatakan dengan adanya dana sosial di Yayasan Al-Jihad merasa mudah menyalurkan infaqnya dan merasa tenang dengan harta yang disalurkan karena Bapak Semi merasa tepat menyalurkan hartanya kepada Yayasan Al-Jihad yang jelas penggunaannya, apalagi di

⁶⁰ Majalah Dana Sosial Edisi 46 Mei 2011 / Jumadil Ula-Jumadits Tsaniah 1432 H, hal 3

majalah dana sosial Al-Jihad dihalaman terakhir selalu ada laporan keuangan DASA yang dipakai pihak Yayasan dan uang yang didapat dari donatur akan selalu dicatat di majalah dana sosial setiap bulannya.⁶¹ Dana sosial Yayasan AL-Jihad sangat berdampak bagi masyarakat luas yaitu bisa menghilangkan kesenjangan sosial yang ada di masyarakat itu sendiri dan menjadikan hati para donatur menjadi tenteram.

b. Dampak bagi pengurus Yayasan dan pengurus Dana Sosial

Selain mempunyai dampak bagi masyarakat luas, dana sosial di Yayasan Al-Jihad Surabaya juga berdampak bagi pengurus Yayasan sendiri, adapun dampak dari dan sosial bagi Yayasan sebagai berikut: Pihak Yayasan merasa terbantu dalam hal segi ekonomi untuk membina panti asuhan serta anak asuh yang dipelihara Yayasan dan infrastrukturnya, Yayasan Al-Jihad semakin lebih dekat dengan masyarakat karena didalam dana sosial ada majalah dana sosial yang setiap bulannya terbit dan dibagikan kepada para donatur secara percuma serta Yayasan Al-Jihad bisa lebih terkenal di masyarakat dengan adanya dana sosial.⁶² Dengan banyaknya donatur yang menyumbang di Yayasan Al-Jihad Surabaya sebagai timbal baliknya pada saat ini Yayasan Al-Jihad menyediakan layanan membantu orang sakit

⁶¹ Bapak Syaiful, sebagai donatur dana sosial (dasa), *Wawancara*, Surabaya, tanggal 10 Juni 2011.

⁶² Bapak Nasir, SE, sebagai ketua Yayasan Al-Jihad Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, tanggal 12 Juni 2011.

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN DAN
PELAKSANAAN PEMBERIAN UPAH JURU PUNGUT DONATUR
DANA SOSIAL DI YAYASAN AL-JIHAD SURABAYA**

Islam memperbolehkan melakukan praktek penghimpunan dana sosial untuk kemaslahatan umat, tidak ada larangan sama sekali mengenai penghimpunan dana sosial, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi SAW. Lembaga Syari'ah sangat berperan untuk menghimpun atau menyalurkan infaq, infaq merupakan kegiatan ibadah kepada Allah SWT dan agama islam pun menyuruh umatnya untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan.

Di Yayasan Al-Jihad Surabaya telah membuka praktek penghimpunan dana sosial dari masyarakat luas yang ingin menyalurkan sebagian rizkinya, Yayasan Al-Jihad menerima berupa infaq, shadaqoh, zakat mall, hibah serta wakaf. Dalam praktek penghimpunan dana sosial yang ada di Yayasan Al-Jihad menggunakan sistem pengupahan antara pengurus Yayasan Al-Jihad Surabaya dengan anggota jungut, anggota jungut di sini melainkan dari santri Yayasan Al-Jihad sendiri. Di dalam sistem pengambilan infaq, shadaqoh, zakat mall, hibah serta wakaf di Yayasan Al-Jihad memberlakukan dua sistem, yang pertama yaitu: dengan mendatangi langsung para donatur tetap atau donatur tidak tetap melalui tim juru pungut donatur dana sosial Al-Jihad. Kedua yaitu:

para donatur bisa datang sendiri ke Yayasan Al-Jihad yang dibuka setiap hari senin-jumat. Sesudah para donatur menyumbang hartanya kepada Yayasan pihak Yayasan memberikan sebuah majalah DASA, yang dimana isi dari majalah DASA tersebut adalah dakwah untuk umat Islam dan ada suatu laporan perolehan uang dari para donatur sekaligus peruntukannya.

Di Yayasan Al-Jihad Surabaya hasil dari penghimpunan dana akan digunakan untuk kehidupan sehari-hari anak panti asuhan sekaligus untuk membiayai SPP sekolah anak asuh, untuk dakwah sosial umat Islam dan untuk infrastruktur gedung Yayasan Al-Jihad Surabaya, di sini yang melakukan penghimpunan dana (anggota juru pungut) akan diberi upah dari Yayasan sebesar 10% dari hasil penghimpunannya dari donator, penghimpunannya dilakukan setiap satu bulan sekali.

Melihat prosedur penghimpunan dana sosial di Yayasan Al-Jihad diatas tidak ada suatu ketidakjelasan tentang penghimpunannya serta penggunaan dana sosial tersebut, bahkan pihak donatur dan pihak Yayasan sama-sama diuntungkan, pihak Yayasan bisa mendapatkan shadaqah dari para donatur sedangkan donatur mendapatkan majalah DASA yang isinya dakwah Islam. Masalah penghimpunan dana sosial untuk kepentingan umat, Islam tidak melarangnya sama sekali.

⁶³ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, 273

يَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶⁴

Rambu-rambu pengupahan dalam Islam ada 2 yakni adil dan layak. Adil bermakna 2 hal ; (1) jelas dan transparan, (2) proporsional. Sedangkan Layak bermakna 2 hal;(1), cukup pangan, sandang dan papan, (2), sesuai dengan pasaran.

[illegible]

Di Yayasan Al-Jihad Surabaya telah membuka pekerjaan sebagai penggali dana donatur dana sosial, yang dimana nantinya seorang penggali dana / jungut akan diberi upah sebesar 10% dari hasil penggalan dana tetapi pada saat ini upah tersebut tidak lagi 10% melainkan diberi tambahan oleh direktur dana sosial melalui kebijakannya sendiri sebanyak Rp 10.000,00-Rp 30.000,00, suatu kebijakan memberi tambahan upah itu muncul karena direktur DASA memandang bahwa tim juru pungut dalam mengambil dana dari donatur menggunakan transportasi berupa sepeda motor sendiri, untuk biaya bensin dan sebagainya dalam penghimpunan dana dari donatur. Itu semua dilakukan oleh direktur dana sosial karena untuk keadilan semata.

Disini anggota jungut bisa dikatakan sebagai amil zakat karena pekerjaannya adalah mengumpulkan uang dari donatur yang menyalurkan zakat, infaq, hibah serta shadaqahnya, dalam peraturan yang ada pada bab dua bahwa upah amil zakat adalah seperdelapan (12,5 %) dari hasil kerjanya. Melihat upah yang diterima anggota jungut pada saat ini yaitu 10 % dari hasil penggalan dana dan diberi tambahan Rp 10.000,00-Rp 30.000,00. Dengan adanya penambahan upah tersebut maka upah anggota jungut sudah hampir mencapai 12, 5 %.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberian Upah Juru Pungut Donatur Dana Sosial di Yayasan Al-Jihad Surabaya

Yayasan Al-Jihad Surabaya merupakan suatu lembaga yang bergerak dibidang keagamaan yang dimana suatu kebijakan dari lembaga itu sendiri, begitupun juga dalam sistem penentuan pengupahan yang dilakukan di Yayasan Al-Jihad dalam memberi upah bagi para pekerja di Yayasan berasal dari musyawarah pengurus Yayasan itu sendiri. Salah satu pengupahan yang dilakukan Yayasan Al-Jihad yaitu dalam pengupahan anggota juru pungut dana sosial yaitu dari hasil musyawarah Yayasan Al-Jihad, pada awal mulanya ditentukan upah yang diterima anggota jungut sebesar 5 % dari hasil penggalian dana dari para donatur dan pada saat ini menjadi 10 % dan diberi tambahan Rp 10.000,00-Rp 30.000,00, sistem itu berlaku dikarenakan jumlah donatur setiap bulannya mempunyai perkembangan yang signifikan karena setiap bulannya donatur selalu bertambah akan tetapi tidak dipastikan dan itu mempunyai dampak pekerjaan anggota jungut semakin bertambah juga akibat bertambahnya donatur tersebut. Sistem pemberian upah yang dilakukan di Yayasan Al-Jihad sudah sesuai dengan salah satu syarat upah yang diajarkan oleh Islam yaitu upah diserahkan diwaktu pekerjaan itu selesai yaitu anggota jungut diberi upah diwaktu akhir bulan pada waktu penyerahan uang kepada direktur DASA. Masalah pembayaran upah ini ada sebuah hadist yang berbunyi:

Selama ini banyak orang yang memaknai sedekah atau bisa disebut dana sosial hanya sebagai sarana untuk berhubungan dengan Allah semata, sehingga kecendrungan mereka hanya mengucapkan kalimat syukur dan membelanjakan

D. Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Adanya Dana Sosial di Yayasan Al-Jihad Surabaya

Selama ini banyak orang yang memaknai sedekah atau bisa disebut dana sosial hanya sebagai sarana untuk berhubungan dengan Allah semata, sehingga kecendrungan mereka hanya mengucapkan kalimat syukur dan membelanjakan

Di samping itu, dana sosial yang ada di Yayasan AL-Jihad dapat meruntuhkan kesenjangan sosial yang ada di masyarakat dan akan mendekatkan

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرْقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَا هِدْ جِيرَانَكَ (رواه مسلم)

Pesan Rasulullah di atas mungkin dianggap sepele oleh sebagian karena hanya bersedekah kepada tetangga. Akan tetapi, jika sedikit kebaikan yang kita kerjakan kalau niatnya ikhlas maka akan kan pahala. Selain itu Rasulullah SAW berpesan melalui hadits untuk tidak hidup individualistik dan tidak peduli pada kehidupan. Pesan Nabi tersebut akan menciptakan suasana keakraban antarmanusia) tanpa adanya kekerasan dan pendiskriminasian pada si miskin.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ (رواه الترمذی)

Dari Abdullah bin Sala r.a. berkata: Rasulullah saw. Bersabda: wahai sekalian manusia! Tebarkanlah perdamaian, sambunglah tali persaudaraan, berilah makanan kepada orang lapar, dan dirikanlah shalat malam di tengah

Sistem ketentuan pengupahan yang pertama kali dilakukan di Yayasan Al-Jihad kepada anggota jungut yaitu 5 % dari hasil pengambilan dana dari donator dan berubah lagi 10 %, akan tetapi pada saat ini sistem tersebut telah berubah karena ada kebijakan dari direktur dana sosial sendiri, melainkan upah yang diterima tim juru pungut sebesar 10 % dan diberi tambahan upah antara Rp 10.000,00-Rp 30.000,00.

Dana sosial di Yayasan Al-Jihad latar belakang berdirinya yaitu dari masyarakat luas, yang dimana masyarakat pada saat itu sangat antusias mau membantu Yayasan Al-Jihad, hal ini mempunyai dampak positif bagi kedua belah pihak, yaitu: pihak Yayasan dan pihak masyarakat, pihak Yayasan sangat terbantu adanya dana sosial untuk menghidupi panti asuhan dan pembangunan infrastruktur yang ada, sedangkan dimasyarakat berdampak meruntuhkan

kesenjangan sosial yang ada dimasyarakat, mendekatkan seseorang kepada masyarakat.

Dari semua uraian yang telah dipaparkan diatas dengan adanya dana sosial di Yayasan Al-Jihad yang berdiri ditengah-tengah masyarakat, mulai dari pengelolaannya sampai dampak bagi masyarakat tidak adanya penyimpangan dari peraturan hukum Islam yang ada, tetapi pada sistem pelaksanaan pemberian upah anggota jungut yang dimana pelaksanaannya anggota jungut diberi upah 10% dan mendapat tambahan Rp 10.000,00-Rp 30.000,00 sudah hampir sesuai dengan ketentuan yang ada.

A. Kesimpulan

1. Ketentuan dan pelaksanaan pemberian upah jungut donatur DASA di Yayasan Al-Jihad Surabaya yaitu pada awal mulanya upah jungut berasal dari musyawarah Yayasan Al-Jihad Surabaya, yang dimana upah jungut mendapat 5 % dari hasil penghimpunan dana tetapi pada saat ini jungut mendapat 10 %, kenaikan itu karena perkembangan ekonomi yang dimasyarakat dan hasil studi lapangan dengan lembaga sosial yang lain, akan tetapi pada saat ini pelaksanaan pemberian upah jungut yaitu 10% dari hasil penghimpunan dana dan mendapat tambahan Rp 10.000,00-Rp 30.000,00.

a. Ketentuan pemberian upah jungut sesuai dengan landasan teori yang telah dipaparkan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, yang dimana ketentuan pemberian upah jungut pada saat ini sebesar 10 % dan

diberi tambahan Rp 10.000,00-Rp 30.000,00. Dengan adanya tambahan tersebut upah jungut hampir mencapai 12,5 %. Ketentuan dalam Islam upah seorang petugas zakat, infaq dan shadaqah yaitu sebesar seperdelapan (12,5 %) dari hasil kerjanya.

- b. Pelaksanaan pemberian upah jungut di Yayasan Al-Jihad Surabaya tidak bertentangan dengan peraturan islam yang ada karena upah jungut diberikan pada waktu pekerjaannya sudah selesai.

B. Saran

1. Sebaiknya Yayasan Al-Jihad lebih memperluas jaringan agar donatur DASA di Yayasan Al-Jihad semakin bertambah setiap bulannya.
2. Sebaiknya Yayasan dalam melakukan perekrutan anggota jungut donatur DASA tidak saja melalui interview, melainkan membuat surat lamaran pekerjaan terlebih dahulu, itu dilakukan karena melatih santri membuat surat lamaran yang baik dan benar.
3. Dalam ketentuan pemberian upah kepada anggota jungut sebaiknya upah jungut tidak lagi diberi 10 % dan diberi tambahan Rp 10.000,00-Rp 30.000,00 tetapi sesuai dengan peraturan Islam upah petugas zakat, infaq atau shadaqah sebesar seperdelapan atau 12,5 % dari hasil kerjanya.

- Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam Perspektif Teori Sistem dan Aspek Hukum*, Surabaya, Putra Media Nusantara, 2002
- Lapidus, A.m, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, t.t.
- Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi (Fiqh Muāmalat)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzab*, Bandung, Hasyimi Pers, Cet. XIII, 2010
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhāri Masykul Bihasyiyah As-Sindi juz 2*, Dar AL-Fikr: Beirut, t.t.
- Muhammad Ja'far, *Tuntunan Ibadat Zakat, Puasa, & Haji*, Jakarta, Kalam Mulia, Cet. 3, 1997
- Muhammad Rawwas Qol'ahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khattab r.a*, Jakarta, Rajawali Perss, 1999
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta, PT Mizan Publika, 2010
- Pius a Partanto & M. Dahian, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 1994
- Rahcma Syafei, *Fiqh Muāmalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia. Cet. X, t.t.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta, Gema Insani, 2006
- Saifulloh Al Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, t.t.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, jilid 3*, Kairo, Dār al-Fath li al-I'lam al-Arabiyy, 1410 H. /1990 M
- Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya, CV. Aulia, 2005
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung, PT. Sinar Baru Algensindo. Cet. 39, 2006
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2008
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998

Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2001

Sunan Al-Daruquthni, kitab *Al-Buyu'* 93:47, no.195). Sunan al-Baihaqi al-Kubra, kitab *Al-Buyū'*, bab "*Al-Nahy'an 'Ashb Al-Fahl*", (5:339)

Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Damaskus, Dār Al-Fiqr Al-Mua'sshim, Cet. VIII, Jilid V, 2005

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta, PT. Mitra Kerjaya Indonesia, Cet. Kesebelas, 2010

....., *Ibadah Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cet. Agustus, 1998

Departemen Agama Republik IndonesiaI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan,2006

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

Petunjuk Teknis Penulis Skripsi. Surabaya, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Cet. 3, 2011

Majalah dana sosial Al-Jihad Edisi 46

<http://blog.re.or.id/tiga-sumpah-nabi.htm>

<http://ekisonline.com/component/content/article/34-ekonomi-mikro/163-tenaga-kerja-dan-upah-dalam-islam.html>